



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SARIFUDDIN
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 550865

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.010.000.000**

1. Tanah Seluas 2.013 m2 di KAB / KOTA MAJENE, HASIL SENDIRI
Rp. 45.000.000
2. Tanah Seluas 282 m2 di KAB / KOTA MAJENE, HASIL SENDIRI
Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 281 m2 di KAB / KOTA MAJENE, HASIL SENDIRI
Rp. 50.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/176 m2 di KAB / KOTA
MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/96 m2 di KAB / KOTA
MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
6. Tanah Seluas 628 m2 di KAB / KOTA MAJENE, HASIL SENDIRI
Rp. 25.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **53.400.000**

1. MOTOR, HONDA XIBO2N04LO/T SOLO Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 6.000.000
2. LAINNYA, SEPEDA POLYGON Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
1.900.000
3. MOTOR, YAMAHA B 5D A/T / SEPEDA MOTOR Tahun 2021,
HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000



4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR/X1H02N32L1A/T/ SOLO
Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	8.100.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	43.187.450
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.114.687.450
III. HUTANG	Rp.	21.990.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.092.697.450

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.